

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL (STUDI EMPIRIS PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR)

Maria Aurelia Voni Paso

email : mirapaso@yahoo.com

Lilik Sri Hariani

Rita Indah Mustikawati

(Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kanjuruhan Malang)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Alokasi Belanja Modal. Belanja Modal mempunyai peranan penting karena dapat menambah aset tetap dan dapat memenuhi pelayanan terhadap publik. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur yang melaporkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 kepada Dirjen Perimbangan dan Keuangan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan PAD, DAU, dan DAK berpengaruh terhadap Belanja Modal. Secara parsial PAD dan DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan

Belanja Modal.

Abstract

This study aims to determine the effect of Local Revenue (PAD), the General Allocation Fund (DAU), and the Special Allocation Fund (DAK) on Capital Expenditure Allocation. Capital expenditure has an important role because it can add fixed assets and provide services to the public. The samples are 29 Regencies and 9 Cities in East Java Province who reported the 2015 Regional Government Budget (APBD) to the Director General of Fiscal Balance and Finance. The analytical tool used is multiple linear regression analysis. The study finds that simultaneous Local Revenue (PAD), the General Allocation Fund (DAU), and Special Allocation Fund (DAK) influence to Capital Expenditures. Partially, Local Revenue (PAD) and the General Allocation Fund (DAU) affect capital expenditure, while Special Allocation Fund (DAK) does not affect to The Capital Expenditure.

Keywords : Local Revenue (PAD), the General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) and Capital Expenditure Allocation.

PENDAHULUAN

Perkembangan daerah di Indonesia semakin maju, seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan mengenai pembagian dan pembentukan daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat otonom dan menerapkan asas desentralisasi. Otonomi daerah merupakan suatu bentuk perwujudan

pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dimana Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri baik dari sektor keuangan maupun dari sektor nonkeuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, pasal 25 disebutkan, sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua sumber PAD yang terbesar. Setiap daerah mempunyai dasar pengenaan pajak yang berbeda-beda tergantung dari kebijakan Pemerintahan Daerah setempat. Untuk daerah dengan kondisi perekonomian yang memadai, akan dapat diperoleh pajak yang cukup besar. Tetapi untuk daerah tertinggal, Pemerintah Daerah hanya dapat memungut pajak dalam jumlah yang terbatas. Demikian halnya dengan retribusi daerah yang berbeda-beda untuk tiap daerah.

Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Belanja modal dibiayai dari PAD, DAU, DAK, DBH dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah, namun dari dana tersebut tidak semuanya terealisasi dengan benar dan tepat. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya infrastruktur yang belum memenuhi standar atau bisa dikatakan belum memenuhi pelayanan kepada publik secara maksimal. Hal tersebut membuktikan bahwa PAD, DAU, dan DAK sangat berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal untuk memenuhi pelayanan kepada publik dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka akan dilakukan suatu penelitian dengan judul: "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur)".

KAJIAN PUSTAKA

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (Halim 2012:107).

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Halim (2016:171) yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006, komponen dari pendapatan PAD terdiri atas :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sebaiknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh DAU relatif besar,

dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai (Halim, 2009).

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan pemerintah pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang. Dana alokasi khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup (Sulistyowati 2011).

Pengalokasian belanja modal merupakan hal yang penting karena belanja modal, pemerintah daerah difokuskan untuk menambah aset daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap publik. Variabel dari APBD yang berhubungan dengan pengalokasian belanja modal adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan dari dana perimbangan, variabel yang berpengaruh adalah Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan pemaparan diatas tentang hubungan PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal, serta hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wandira (2013) dan Hermawan (2016) menyebutkan bahwa secara simultan PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dari pemaparan tersebut maka dapat ditarik hipotesis pertama yaitu :

Hipotesis 1 : PAD, DAU, DAK berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan suatu daerah dari potensi yang dimiliki oleh daerah. Sumber penerimaan utama bagi suatu daerah adalah Pendapatan Asli daerah (PAD) yang terdiri atas : Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada penelitian sebelumnya, Heliyanto (2016) menyatakan bahwa "Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi Belanja Modal". Hermawan (2016), dan Febriana (2015), menyimpulkan bahwa "Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap alokasi Belanja Modal". Dari penelitian-penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peranan yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan demikian hipotesis kedua yaitu:

Hipotesis 2 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal.

Pelaksanaan desentralisasi dilakukan dengan pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya. Wujud desentralisasi itu adalah dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana Perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (UU No. 33/2004). Hasil penelitian dari Heliyanto (2016), Sulistyowati (2011), dan Febriana (2015) menyimpulkan bahwa "Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal". Dari beberapa penelitian diatas menunjukkan bahwa DAU merupakan sumber dana yang penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanja langsung maupun tidak langsung. DAU juga menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Dengan demikian hipotesis ketiga yaitu :

Hipotesis 3 : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal

Dana perimbangan merupakan perwujudan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan

khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Wandira (2013) menyimpulkan bahwa "DAK berpengaruh terhadap Belanja Modal". Karena DAK sangat penting untuk kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Dari pemaparan tersebut maka dapat ditarik hipotesis keempat yaitu :

Hipotesis 4 : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian dirumuskan dengan tujuan adanya arah yang jelas dan target yang hendak dicapai dalam penelitian. Jika tujuan penelitian jelas dan terumuskan dengan baik, maka penelitian dan pemecahan masalah akan berjalan dengan baik pula (Azwar 2013:34). Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Adapun ruang lingkup penelitian ini yaitu penelitian pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan Laporan APBD pada tahun 2015. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian sampel dalam penelitian ini adalah 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur. Variabel bebas (variabel X) terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), dan Dana Alokasi Khusus (X3). Variabel Y yaitu Belanja Modal.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi (*documentation*) adalah suatu pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi melalui situs dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah via website <http://www.djpk.depkeu.go.id>. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Uji Asumsi Klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis *ordinary least square (OLS)*. Uji asumsi klasik yang sering digunakan yaitu uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, uji autokorelasi. Pengujian hipotesis menggunakan Uji F dan Uji t. Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel bebas dapat digunakan untuk menjelaskan variabel terikat. Uji t berfungsi untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat.

HASIL PENELITIAN

Analisis Linear Berganda

Hasil analisis regresi linier berganda dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 115005,1 + 0,517 X_1 + 0,151 X_2 - 0,185 X_3 + e$$

Dari persamaan regresi tersebut, diketahui bahwa:

- Nilai konstanta 115005,1 memiliki arti jika variabel X1 (PAD), X2 (DAU), dan X3 (DAK) sama dengan 0 (nol), maka Y (Belanja Modal) sebesar 115005,1.
- Koefisien regresi X1 (PAD) bertanda positif sebesar 0,517 menunjukkan bahwa kenaikan X1 sebanyak 1 satuan akan menyebabkan Y (Belanja Modal) meningkat sebesar 0,517 dan sebaliknya.
- Koefisien regresi X2 (DAU) bertanda positif sebesar 0,151 menunjukkan bahwa kenaikan X2 sebanyak 1 satuan akan menyebabkan Y (Belanja Modal) meningkat sebesar 0,151 dan sebaliknya.
- Koefisien regresi X3 (DAK) bertanda negatif sebesar -0,185 menunjukkan bahwa kenaikan X3

sebanyak 1 satuan akan menyebabkan Y (Belanja Modal) turun sebesar 0,185 dan sebaliknya.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti garis diagonal, hal ini berarti data berdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi layak digunakan dalam penelitian. Berdasarkan hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa angka *Asymp.Sig* sebesar + 0,411 yang berada diatas 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat autokorelasi. Hasil uji asumsi klasik multikolinieritas dengan pendekatan *Variance Inflation Factor* (VIF) menunjukkan bahwa variabel X1 (PAD), X2 (DAU), dan X3 (DAK) masing-masing memiliki nilai tolerance kurang dari 1 dan nilai VIF kurang dari 10 yang artinya tidak terjadi multikolinieritas. Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar acak tanpa membentuk suatu pola yang jelas. Dengan demikian, dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas sehingga model regresi layak digunakan.

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan uji F menunjukkan bahwa nilai F sebesar 196,542 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, berarti signifikansi F kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel X1 (PAD), X2 (DAU), dan X3 (DAK) secara bersama-sama mempengaruhi Y (Belanja Modal).

ANOVA^b

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|------------------|----|----------------|---------|-------------------|
| 1 | Regression | 3612263922485.0 | 3 | 1204087974162 | 196.542 | .000 ^a |
| | Residual | 208296524803.602 | 34 | 6126368376.577 | | |
| | Total | 3820560447288.6 | 37 | | | |

a. Predictors: (Constant), DAK (x3), DAU (x2), PAD (X1)

b. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial. Berikut hasil uji t:

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Correlations | | | Collinearity Statistics | |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|--------------|---------|-------|-------------------------|-------|
| | | B | Std. Error | Beta | | | Zero-order | Partial | Part | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 115005.1 | 44155.059 | | 2.605 | .014 | | | | | |
| | PAD (X1) | .517 | .024 | .917 | 21.685 | .000 | .963 | .966 | .868 | .896 | 1.116 |
| | DAU (x2) | .151 | .047 | .134 | 3.187 | .003 | .405 | .480 | .128 | .907 | 1.102 |
| | DAK (x3) | -.185 | .146 | -.051 | -1.265 | .215 | -.152 | -.212 | -.051 | .982 | 1.018 |

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

Dari hasil analisis uji t pada tabel di atas terlihat bahwa:

1. Variabel X1 (PAD) menunjukkan nilai signifikansi t sebesar $0,000 < 0,05$, berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel X1 (PAD) terhadap Y (Belanja Modal). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H1 diterima.
2. Variabel X2 (DAU) menunjukkan nilai signifikansi t sebesar $0,003 < 0,05$, berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel X2 (DAU) terhadap Y (Belanja Modal). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H1 diterima.
3. Variabel X3 (DAK) menunjukkan nilai signifikansi t sebesar $0,215 > 0,05$, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel X3 (DAK) terhadap Y (Belanja Modal). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak.

Model Summar
y^p

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .972 ^a | .945 | .941 | 78271.12096 | 1.791 |

a. Predictors: (Constant), DAK (x3), DAU (x2), PAD (X1)

b. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

Dari hasil pengujian di atas, didapat nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,941. Artinya 94,1 % variabel Y dipengaruhi oleh variabel X1, X2 dan X3, sedangkan sisanya sebesar 5,9 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil tersebut terlihat dari nilai Sig.F sebesar 0.000 yang berarti nilai Sig.F kurang dari 0.05 yang berarti sama-sama berpengaruh. Nilai konstanta 115005,1 memiliki arti jika variabel X1 (PAD), X2 (DAU), dan X3 (DAK) sama dengan 0 (nol), maka Y (Belanja Modal) sebesar 115005,1. Pengaruh dari variabel PAD, DAU, dan DAK yang diteliti oleh peneliti pada dasarnya memang memiliki keterkaitan dalam penganggarannya, dari pos penerimaan suatu daerah ada penerimaan yang digali dari potensi daerah itu sendiri dan ada yang bersumber dari pemerintah pusat. Tanpa adanya PAD, daerah tidak bisa mandiri untuk mengelola kekayaan yang dimiliki dan menyebabkan daerah tersebut tidak mengalami pertumbuhan ekonomi. Begitu pula dengan DAU dan DAK, tanpa adanya bantuan pemerintah pusat dengan memberikan DAU dan DAK kepada pemerintah daerah, maka daerah tersebut akan mengalami kesulitan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) sangat penting bagi daerah karena ditujukan untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga berperan penting untuk daerah karena ditujukan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi prioritas nasional untuk pembangunan dan pelayanan terhadap publik, penentuan daerah dalam menerima DAK harus sesuai dengan kriteria umum, khusus dan teknis. Hal ini membuktikan bahwa PAD, DAU, dan DAK sama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil pengujian secara uji t-test yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan nilai sebesar 0,000 atau nilai sig lebih kecil dari nilai alpha (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur memiliki potensi yang besar yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Dengan demikian hipotesis kedua diterima karena didukung dengan adanya data pendukung perhitungan secara statistik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin banyak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima oleh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur, maka semakin besar kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Hasil penelitian dengan uji t-test yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan nilai sebesar 0,003 atau nilai sig lebih kecil dari nilai alpha (0,05) hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel DAU berpengaruh terhadap variabel Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur.

Sehingga hipotesis ketiga yang diajukan oleh peneliti dimana variabel DAU berpengaruh terhadap variabel Belanja Modal dapat diterima hipotesisnya karena disertai dengan adanya data pendukung secara perhitungan statistik. Pengalokasian DAU pada setiap daerah didasarkan pada besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) dan alokasi dasar. Dengan demikian alokasi DAU bagi daerah yang mempunyai potensi fiskalnya besar, tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan mendapatkan alokasi DAU yang jumlahnya kecil. Begitu sebaliknya, bagi daerah yang potensi fiskalnya kecil, tetapi kebutuhan fiskalnya besar maka akan mendapatkan alokasi DAU yang jumlahnya besar.

Berdasarkan hasil penelitian dengan uji-t yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan nilai signifikan t sebesar $0,215 > 0,05$, hal ini dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian hipotesis keempat yang diajukan peneliti dimana DAK berpengaruh terhadap Belanja Modal ditolak hipotesisnya, karena disertai dengan adanya data pendukung perhitungan secara statistik. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, tidak berpengaruhnya DAK terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur karena adanya nilai DAK yang terdapat pada kota Surabaya sebesar 0 Rupiah pada tahun 2015 yang tersaji pada data DAK di situs Dirjen Perimbangan dan Keuangan. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur khususnya kota Surabaya tidak bergantung terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberi nilai manfaat lebih dari satu tahun.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : yang pertama, secara simultan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal. Yang kedua, terdapat pengaruh antara variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal. Yang ketiga, terdapat pengaruh antara variabel Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal. Dan yang keempat, tidak terdapat pengaruh antara variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk Pemerintah Daerah, sebaiknya lebih meningkatkan alokasi Belanja Modal dengan menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan menggunakan bantuan dari Pemerintah Pusat berupa DAU sesuai dengan kebutuhan daerah untuk pembangunan dan pelayanan terhadap publik. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menambahkan variabel baru sebagai variabel independen maupun variabel dependen sangat penting untuk melengkapi hasil penelitian terdahulu dan menggunakan rentang waktu penelitian yang lebih panjang agar dapat memperoleh hasil yang relevan.

Daftar Pustaka

- Febriana, I. S. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 4 (9).
- Halim, A. (2009). *Akuntansi Sektor Publik ; Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Empat*. Jakarta: Salemba Empat.

Maria Aurelia Voni Paso, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Lokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur)

Halim, A. (2016). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul dkk. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Tiga*. Jakarta: Salemba Empat.

Heliyanto, F. (2016). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5 (3): 2460-0585.

Hermawan, A. D. (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana lokasi Khusus (DAK) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Se-Malang Raya*. Skripsi. Universitas Kanjuruhan Malang.

Sulistyowati, D. (2011). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Alokasi Belanja Modal*. Skripsi. Universitas Diponegoro.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Wandira, A. G. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, 2 (1) 2252-6765.